

**PANDANGAN UMUM FRAKSI GOLKAR DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN KEBUMEN**

**TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

TENTANG

- A. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH;**
- B. PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH;**
- C. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA;**
- D. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA;**
- E. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA; dan**
- F. PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2029.**

DISAMPAIKAN PADA

**RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN**

HARI SELASA, 18 AGUSTUS 2026



**FRAKSI GOLKAR DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

**JALAN MERDEKA NO. 06 – TELEPON NO. (0287)-381775
KEBUMEN 54311**



**FRAKSI GOLKAR DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**



**PANDANGAN UMUM FRAKSI GOLKAR DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN KEBUMEN**

**TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

TENTANG

- A. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH;**
- B. PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH;**
- C. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA
DESA;**

- D. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA;**
- E. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA; dan**
- F. PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2029.**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.***

Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna

Yth. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen, para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Kebumen;

Yth. Bupati Kebumen dan Wakil Bupati Kebumen;

Ysh. Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretariat Daerah, para Kepala Bagian di lingkungan Setda Kebumen, para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, dan Staf Ahli Bupati Kebumen;

Ysh. Ketua dan Sekretaris KPU, Ketua Bawaslu, Camat se-Kabupaten Kebumen, serta Pimpinan BUMD;

Ysh. Direktur RSDS dan RSUD Prembun.

Serta yang saya muliakan, hadirin dan undangan Rapat Paripurna, para wartawan media cetak maupun elektronik, serta masyarakat Kabupaten Kebumen di manapun berada yang mengikuti jalannya rapat paripurna ini melalui siaran Kebumen TV dan Radio In FM yang berbahagia.

Sebelum menyampaikan **Pandangan Umum Fraksi**, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna ini dalam keadaan sehat dan tanpa suatu halangan apa pun.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau hingga akhir zaman.
Allahumma Aamiin.

Pertama, dengan penuh hormat, izinkan **Fraksi GOLKAR-DEMOKRAT** menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi kami untuk menyampaikan

Pandangan Umum Fraksi terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen.

Kedua, Fraksi GOLKAR–DEMOKRAT menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kebumen, serta pihak-pihak lain terkait, yang telah menginisiasi, mengkaji, dan mempersiapkan keenam Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Ketiga, Fraksi GOLKAR–DEMOKRAT menyampaikan Selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia! Mengusung tema besar tahun ini, **“Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”**, mari kita jadikan momentum peringatan kemerdekaan ini untuk memperkuat komitmen pengabdian, meningkatkan sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif, serta menghadirkan kebijakan-kebijakan nyata yang berpihak pada pemerataan keadilan dan kesejahteraan masyarakat luas.

Peserta Rapat Paripurna dan hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya kami sampaikan kajian dan telaah terhadap 6 (Enam) **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen** sebagai berikut:

A.PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Fraksi Golkar Demokrat mendukung perubahan ketiga atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah karena diperlukan untuk menyesuaikan kelembagaan dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan daerah.

Fraksi Golkar-Demokrat memandang penataan ini harus mampu mewujudkan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien, sekaligus memperkuat kapasitas BPBD dalam penanggulangan bencana, mendukung pengembangan ekonomi kreatif, serta menata kelembagaan agar lebih terpadu dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Fraksi Golkar Demokrat mempertanyakan bagaimana Pemerintah Daerah memastikan perubahan dan penataan perangkat daerah ini benar-benar meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat tanpa menambah beban birokrasi dan anggaran daerah?

B.PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH;

Setelah mencermati dan mempelajari materi Rancangan Peraturan Daerah beserta dokumen keterangannya, **Fraksi Golkar Demokrat** pada prinsipnya dapat memahami dan menerima urgensi dilakukannya perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2021.

Perubahan tersebut diperlukan untuk menyesuaikan sistem perencanaan pembangunan daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sekaligus memperkuat keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Fraksi Golkar Demokrat memandang penting adanya sinkronisasi antara dokumen perencanaan Kabupaten Kebumen dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Sinkronisasi tersebut harus benar-benar diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik masyarakat Kabupaten Kebumen.

Fraksi Golkar Demokrat mempertanyakan bagaimana Pemerintah Daerah memastikan perubahan Perda ini tidak hanya menghasilkan kesesuaian administratif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas perencanaan, konsistensi penganggaran, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen?

**C.PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA
DESA;**

Fraksi Golkar Demokrat memandang Raperda ini merupakan Perubahan Kedua atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, yang disusun untuk menyesuaikan aturan dengan perkembangan UU Desa dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Pokok perubahannya meliputi masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 (delapan) tahun dengan maksimal 2 (dua) periode, pengaturan pemilihan secara bergelombang, mekanisme calon tunggal, persyaratan dan verifikasi

calon, tugas serta kewajiban Kepala Desa, pertanggungjawaban kepala desa kepada masyarakat, BPD, dan Bupati, serta mekanisme pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

Fraksi Golkar Demokrat mempertanyakan bagaimana Pemerintah Kabupaten menjamin bahwa perubahan ketentuan pemilihan dan masa jabatan Kepala Desa, khususnya mekanisme calon tunggal dan masa jabatan 8 (delapan) tahun, tetap menjamin demokrasi, partisipasi masyarakat, serta akuntabilitas Kepala Desa kepada masyarakat?

D.PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA;

Fraksi Golkar Demokrat pada prinsipnya mendukung perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2016 karena diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dan memperkuat tata kelola pengangkatan serta pemberhentian Perangkat Desa agar lebih profesional, transparan, objektif, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum.

Fraksi Golkar Demokrat menilai pengaturan mengenai mekanisme pengangkatan, pemberhentian, pengisian jabatan kosong, serta pembinaan dan pengawasan perlu dilaksanakan secara konsisten agar mampu meningkatkan kualitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat desa.

Fraksi Golkar Demokrat mempertanyakan bagaimana Pemerintah Daerah memastikan seluruh proses pengangkatan, pengisian jabatan kosong, dan pemberhentian Perangkat Desa dapat berjalan objektif, transparan, dan akuntabel serta tidak menimbulkan konflik kepentingan?

E. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA;

Fraksi Golkar Demokrat mendukung perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, karena perubahan ini diperlukan untuk menyesuaikan ketentuan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sekaligus memperkuat kedudukan dan fungsi BPD sebagai lembaga yang mewakili masyarakat desa.

Fraaksi Golkar Demokrat menilai pengaturan mengenai keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, masa keanggotaan 8 tahun dengan maksimal 2 periode, serta peningkatan hak anggota BPD berupa tunjangan, jaminan sosial, dan tunjangan purnatugas merupakan langkah positif untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas BPD.

Namun demikian, **Fraaksi Golkar Demokrat** menekankan agar perubahan tersebut diikuti dengan mekanisme pelaksanaan yang transparan dan adil, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga penguatan hak dan masa keanggotaan BPD tetap diimbangi dengan peningkatan tanggung jawab, kinerja, serta fungsi BPD dalam menyerap aspirasi dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Fraaksi Golkar Demokrat mempertanyakan bagaimana Pemerintah Daerah memastikan penguatan masa keanggotaan dan hak-hak BPD tersebut benar-benar diikuti dengan peningkatan kinerja, fungsi

pengawasan, serta keterwakilan aspirasi masyarakat desa?

F. PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2029;

Fraksi Golkar Demokrat mendukung pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029, karena kebutuhan pembiayaan pemilihan cukup besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan sebesar Rp40 miliar yang dialokasikan secara bertahap pada APBD 2027 dan 2028 merupakan langkah yang diperlukan untuk menjamin kesiapan anggaran sekaligus menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan daerah.

Fraksi Golkar Demokrat menekankan agar dana tersebut dikelola secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan hanya digunakan sesuai peruntukannya, serta apabila terdapat sisa atau perubahan jadwal maupun sistem pemilihan, pengelolaannya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fraksi Golkar Demokrat mempertanyakan apa dasar penetapan dana cadangan sebesar Rp40 miliar, dan bagaimana Pemerintah Daerah memastikan jumlah

tersebut mencukupi untuk kebutuhan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 tanpa mengganggu kemampuan APBD dalam membiayai pelayanan publik dan pembangunan daerah?

Peserta Rapat Paripurna dan hadirin yang kami hormati,

Sebagai penutup, apabila dalam penyampaian **Pandangan Umum Fraksi** ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kami atas nama **Fraksi GOLKAR–DEMOKRAT** menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Kami juga menyampaikan terima kasih atas perhatian Pimpinan Rapat dan segenap Anggota Dewan yang terhormat.

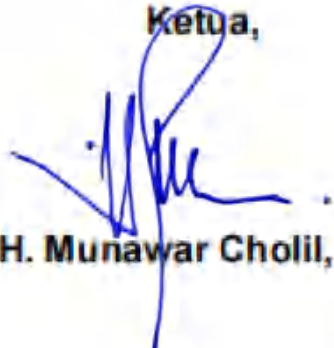
Demikian **Pandangan Umum Fraksi GOLKAR–DEMOKRAT** terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen yang telah kami sampaikan. **Fraksi GOLKAR–DEMOKRAT** menyatakan dapat menerima 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah tersebut untuk **dibahas pada tahapan selanjutnya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku**, dengan harapan pembahasan dilakukan secara objektif, konstruktif, transparan, dan menghasilkan kebijakan yang

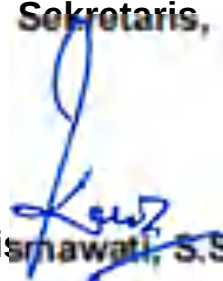
semakin akuntabel serta berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Kebumen.

Billahi Taufik Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**FRAKSI GOLKAR DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Ketua,

H. Munawar Cholil, B.A

Sekretaris,

Krishnawati, S.Sos